

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data pada penelitian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Bisa diartikan semakin besar laju pertumbuhan ekonomi maka semakin kecil kemungkinan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar kerja meningkat, tidak secara langsung menyebabkan peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka. Faktor ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingginya fleksibilitas pasar tenaga kerja dan dominasi sektor informal di DKI Jakarta.
3. Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya upah yang lebih tinggi bisa mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak, dan mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta.
4. Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 74,6% dan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika ekonomi tumbuh, terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, yang kemudian menciptakan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi. Artinya,

peningkatan kegiatan ekonomi akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi jumlah tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, hasil penelitian ini juga menambah bukti bahwa kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menjadi strategi aktif untuk mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak secara otomatis mengurangi tingkat pengangguran di DKI Jakarta. Ini bisa terjadi karena tidak semua angkatan kerja yang aktif mencari kerja berhasil terserap dengan baik, terutama jika ketersediaan lapangan kerja tidak memadai. Hal ini memberikan pelajaran bahwa kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta perlu lebih terarah dan fokus pada faktor-faktor yang terbukti signifikan.
3. Hasil ini mengindikasikan adanya dinamika unik dalam pasar tenaga kerja di DKI Jakarta. Artinya, kenaikan upah minimum justru diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka, karena upah minimum dapat berperan dalam meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka.

b. Implikasi Praktis

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang padat karya, untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
2. Masyarakat, khususnya angkatan kerja muda dan pendatang, dapat memahami bahwa meskipun peluang kerja tersedia, perlu peningkatan keterampilan dan penyesuaian terhadap kebutuhan industri agar mampu bersaing secara efektif.

3. Peningkatan upah minimum provinsi perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan agar tidak mengurangi penyerapan tenaga kerja.

C. Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta, peneliti ingin memberikan beberapa saran, khususnya kepada pihak pemerintah atau lembaga terkait.

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah lebih aktif dan konsisten dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), misalnya lewat program pelatihan kerja seperti yang diselenggarakan Balai Latihan kerja (BLK). Penting agar program pelatihan tersebut tidak hanya berjalan secara formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta. Dengan begitu, pelatihan bisa menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, bahkan bisa mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru yang pada akhirnya turut menciptakan lapangan kerja baru.
2. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang padat karya, agar laju pertumbuhan ekonomi dapat lebih berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Diperlukan program pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Ini akan membantu meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.
4. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan upah minimum, mempertimbangkan dampaknya terhadap pengangguran dan daya saing industri. Kebijakan upah harus seimbang antara memberikan perlindungan kepada pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan guna mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum provinsi serta tingkat pengangguran dan variabel-variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.

